

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang pesat menciptakan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Komposisi, distribusi, dan laju pertumbuhan penduduk sangat menentukan tingkat perkembangan suatu wilayah. Interkoneksi yang kompleks antara kependudukan dan faktor-faktor lainnya membentuk dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Program Keluarga Berencana (KB) memang penting dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk, namun tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini disebabkan, masalah kependudukan suatu wilayah lebih kompleks kaitannya dengan jumlah penduduk yang cenderung tinggi, di mana terjadi ketidaksimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan terletak di jalur Pantai Utara Jawa, Kota Semarang memiliki aksesibilitas yang sangat tinggi. Posisi strategis ini menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi dan menarik minat penduduk untuk bermigrasi sehingga memicu urbanisasi dan pemekaran wilayah yang signifikan. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Semarang telah menyebabkan pusat kota semakin padat dan mendorong sebagian masyarakat bergerak ke kawasan pinggiran kota. Pemekaran wilayah yang dilakukan pada tahun 1994 tidak serta merta menyelesaikan masalah kepadatan. Dinamika

kelahiran, kematian, dan migrasi terus membentuk pola persebaran penduduk di 16 kecamatan tersebut (Sari et al., 2023).

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	2021	2022	2023
Mijen	83,321	85,818	89,948
Gunungpati	98,343	98,674	100,752
Banyumanik	141,689	141,319	143,433
Gajahmungkur	55,857	55,490	56,350
Smg Selatan	61,616	61,212	62,179
Candisari	74,952	74,461	75,614
Tembalang	191,560	193,480	198,862
Pedurungan	193,128	193,125	196,526
Genuk	125,967	128,696	132,473
Gayamsari	69,792	69,334	70,409
Smg Timur	65,859	65,427	66,481
Smg Utara	116,820	116,054	117,887
Smg Tengah	54,696	54,338	55,213
Smg Barat	147,885	146,915	149,326
Tugu	32,948	33,079	33,795
Ngaliyan	142,131	142,553	145,495
Jumlah	1,656,564	1,659,975	1,694,743

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2024)

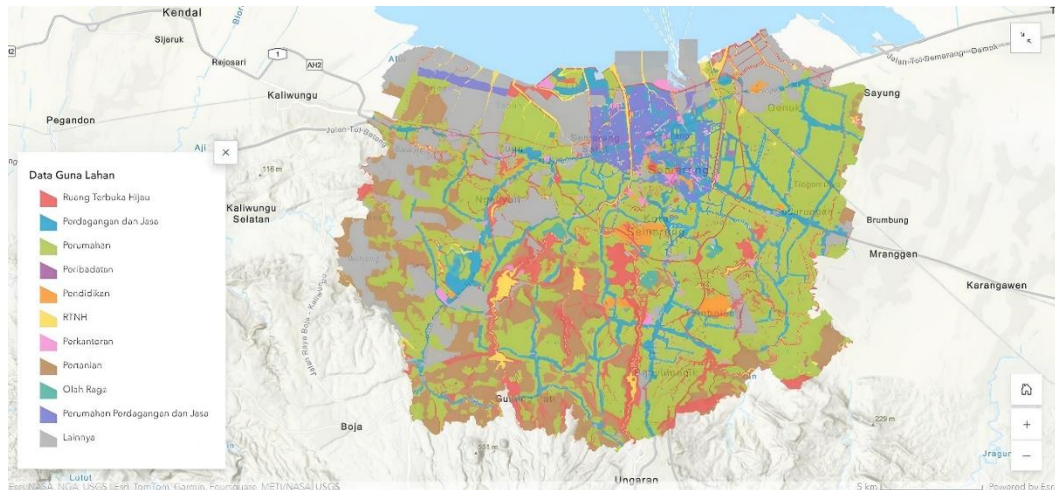
Tabel 1.1 menggambarkan peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang selama periode 2021-2023, yang berakibat pada semakin padatnya wilayah kota. Dengan luas wilayah yang tetap, yakni sebesar 373,78 km², kepadatan penduduk bertambah dari 4.432 jiwa/km² menjadi 4.534 jiwa/km². Meskipun terjadi peningkatan, laju pertumbuhannya tidak konsisten dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, akumulasi laju kepadatan penduduk Kota Semarang dalam tiga periode tersebut sekitar 2,3 %.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang telah memicu kebutuhan akan lahan yang semakin besar untuk pembangunan pemukiman. Dengan ketersediaan lahan yang terbatas maka terjadi alih fungsi lahan yang dapat berdampak pada lingkungan dan tata ruang kota (Paul & Rashid, 2017 dalam Zahra et al., 2021). Salah satu indikator utama perkembangan suatu kota adalah meningkatnya luas area yang digunakan untuk pembangunan perumahan, gedung, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya (Zahra et al., 2021). Dalam hal ini penggunaan lahan di Kota Semarang dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu lahan pertanian sawah, lahan pertanian non-sawah, seperti kebun atau perkebunan, serta lahan non-pertanian yang meliputi permukiman, industri, dan fasilitas umum (Dispertan Kota Semarang, 2022).

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kota Semarang digunakan untuk pemukiman. Terdapat pergeseran tata guna lahan yang signifikan, terlihat dari perubahan lahan hijau khususnya lahan sawah menjadi pemukiman.

Gambar 1.1

Peta Tata Guna Lahan Kota Semarang



Sumber : Riatmaja et al (2021)

Hal ini juga didukung oleh adanya data dari Dinas Pertanian Kota Semarang, bahwa luas lahan sawah di Kota Semarang mengalami penyusutan secara konsisten setiap tahun. Pada periode 2021-2023, luas lahan menyusut dari 2.218,79 Ha menjadi 2.212,52 Ha atau berkurang sekitar 0,28% dari total luas lahan awal tahun 2020 yang mencapai 2.388,54 Ha. Fenomena ini dapat diartikan bahwa tiga tahun terakhir merupakan bentuk anjlokkan luas lahan dari tahun 2020 yang belum mengalami pengurangan lahan secara signifikan (Dinas Pertanian Kota Semarang, 2023). Sementara itu, berdasarkan data terbaru, luas lahan pertanian non-sawah menurun 0,09%. Sebaliknya, lahan non-pertanian untuk pembangunan infrastruktur seperti pemukiman, perkantoran, jalan, sungai, dll terus meningkat, mencapai 19.444,58 Ha atau naik 3,14% (Dispersan Kota Semarang, 2022).

Peningkatan jumlah penduduk yang cepat memaksa perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran. Hal ini, jika tidak memperhitungkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, dapat memicu penurunan muka tanah dan menyebabkan risiko bencana tanah longsor. Penambahan beban seperti bangunan di atas lereng, akan meningkatkan gaya dorong yang mengakibatkan ketidakstabilan lereng, di mana tanah akan mudah bergerak. Tanah longsor merupakan fenomena geologi di mana material penyusun lereng, baik berupa batuan, tanah, maupun campuran keduanya mengalami pergerakan menuruni atau keluar lereng (Kementerian ESDM, 2005). Pergerakan massa batuan atau tanah pada lereng merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor termasuk kondisi morfologi, geologi, hidrogeologi, dan tata guna lahan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi lereng yang rentan terhadap gerakan massa. Lereng yang rentan akan benar-benar mengalami pergerakan nyata jika terdapat faktor pemicu berupa hujan deras, getaran atau aktivitas manusia seperti melakukan penggalian tanah atau pembangunan dengan beban yang melebihi kapasitas lereng (Karnawati, 2005 dalam Fikri et al., 2022). Selain itu, ketiadaan vegetasi yang memadai pada lereng akan mengurangi daya dukung tanah. Kondisi ini menyoroti pentingnya peran pohon dan tumbuhan sebagai penopang alami yang dapat membantu menstabilkan struktur tanah. Akar-akar tumbuhan berfungsi untuk mengikat partikel tanah sehingga mampu mengurangi erosi dan menjaga kekokohan lereng.

Bencana tanah longsor sering terjadi terutama pada saat musim penghujan. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Kota Semarang umumnya mengalami musim penghujan antara bulan Desember sampai Mei, dengan rata-rata curah hujan tahunan yang mencapai 1500-3000 mm (Pemerintah Kota Semarang, 2024). Analisis data curah hujan periode 2021-2023, terdapat variabilitas curah hujan yang cukup tinggi. Bulan Februari tercatat sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi mencapai rata-rata 463,46 mm, sedangkan bulan Juli dan Agustus dengan curah hujan terendah memiliki rata-rata 83,40 mm dan 58,56 mm (BPS Kota Semarang, 2023 & BPS, 2024). Jika dilihat dari kondisinya, curah hujan di Kota Semarang menunjukkan pola yang tidak merata. Perubahan jumlah, intensitas dan distribusi curah hujan yang tidak menentu ini dapat memicu berbagai masalah, termasuk ancaman terhadap kestabilan lereng. Dengan demikian, besarnya curah hujan tidak hanya ditandai melalui musim, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti letak geografis, kondisi topografi, dll.

Kondisi topografi termasuk kemiringan lereng merupakan parameter penting dalam menganalisis kestabilan lereng. Lereng yang curam atau terjal akan mengurangi faktor keamanan lereng itu sendiri. Kemiringan lereng di Kota Semarang sangat beragam, mulai dari $<8\%$ (datar) hingga $>40\%$ (sangat curam). Semarang bagian bawah dengan topografi datar, menjadi pusat aktivitas seperti pemerintahan, perdagangan, dan transportasi. Sebaliknya, wilayah selatan yang berbukit-bukit dikenal dengan sebutan Semarang atas, memiliki kemiringan yang curam, menunjukkan perbedaan topografi yang

signifikan antara kedua wilayah tersebut. Bahkan, wilayah dataran tinggi mendominasi sebesar 66% dari total luas wilayah Kota Semarang (Pemerintah Kota Semarang, 2024). Dataran tinggi ini secara umum berupa perbukitan dengan rentang ketinggian antara 90,56-348 mdpl yang teridentifikasi di kawasan pinggir dan Kota Semarang bagian Selatan meliputi, Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik dan Tembalang (Pemerintah Kota Semarang, 2021).

Selain itu, karakteristik material penyusun lereng seperti jenis tanah dan batuan memainkan peran sebagai wujud elemen utama yang sangat berpengaruh terhadap potensi terjadinya longsor (Rahmad et al., 2018 dalam Zoriani et al., 2023). Baik kepadatan dan daya dukung suatu material secara langsung memiliki korelasi dengan kekuatan geser tanah atau batuan. Ketika material penyusun lereng memiliki sifat yang lemah atau mudah jenuh terhadap air maka saat itulah tanah mudah mengalami pergerakan. Penelitian ini melibatkan berbagai jenis tanah yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepekaanya, yaitu tidak peka (aluvial), agak peka (latosol), kurang peka (mediteran cokelat tua), peka (grumusol), dan sangat peka (regosol, litosol, organosol, rezina).

Tabel 1.2

Data Jenis Tanah Kota Semarang

No.	Jenis Tanah	Skor	Luas (Ha)	Persentase
1.	Aluvial	1	15617,9	40,1%
2.	Latosol	2	15250	39,1%
3.	Mediteran Cokelat Tua	3	7561,3	19,4%
4.	Grumosol	4	531,2	1,4%
5.	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	5	0	0%
Jumlah			39860,4	100%

Sumber : ArcGIS (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 jenis tanah yang dominan tersebar di wilayah Kota Semarang adalah jenis tanah aluvial dan latosol. Hal ini dapat terlihat bahwa jenis tanah aluvial seluas 15.617,9 Ha atau 40,1 % dan jenis tanah latosol seluas 15.250 Ha atau setara dengan 39,1 %. Melalui data tersebut dapat disimpulkan jika tanah aluvial dan latosol tidak memiliki potensi besar terhadap terjadinya longsor karena jenis tanah ini bersifat lekat dan tidak peka. Meskipun jenis tanah aluvial dan latosol memiliki stabilitas yang baik, kondisi tertentu salah satunya curah hujan yang tinggi dapat memicu pengikisan pada tanah. Bahkan, dalam kondisi ekstrem, erosi yang parah dapat memicu longsor pada jenis tanah tersebut. Penyebab longsor merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor alam dan manusia. Perubahan pada satu faktor dapat memicu

atau memperparah kondisi faktor lainnya, menciptakan efek domino yang berujung pada kejadian bencana tanah longsor.

Kota Semarang memiliki beberapa titik yang rawan terhadap terjadinya bencana longsor, terdapat 9 kecamatan 37 kelurahan di antaranya Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Candisari, Kecamatan Ngalian, Kecamatan Tugu, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Banyumanik (BPBD Kota Semarang, 2014). Berdasarkan data kejadian tanah longsor di berbagai daerah Jawa Tengah pada tahun 2023, Kota Semarang mencatat jumlah kejadian tertinggi dibandingkan daerah lain, seperti Banyumas (33 kejadian), Kebumen (20 kejadian), Grobogan (9 kejadian), Cilacap (5 kejadian), Jepara dan Kendal (2 kejadian) (DIBI BNPB, 2023). Tingginya angka kejadian ini menyebabkan dampak yang signifikan, termasuk kerusakan rumah, terputusnya infrastruktur, dan korban jiwa. Dengan banyaknya wilayah rawan longsor di Kota Semarang, angka kejadian ini menunjukkan bahwa bencana tanah longsor telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat Kota Semarang.

Tabel 1.3

Dampak Bencana Tanah Longsor

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban (Meninggal, Terluka, Menderita, Mengungsi)	Kerugian
2021	127	138	52.500.000
2022	121	142	1.827.000.000
2023	52	198	2.438.000.000
Total	300	478	4.317.500.000

Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)

Tabel 1.3 secara jelas menunjukkan tren peningkatan signifikan jumlah korban jiwa akibat bencana tanah longsor di Kota Semarang. Selama tiga tahun terakhir, bencana ini telah merenggut 478 jiwa yang juga disertai dengan kerugian materi yang besar. Para korban tersebut di antaranya akumulasi dari korban yang meninggal, luka-luka dan pengungsi yang terus bertambah seiring dengan meningkatnya skala bencana. Hal ini selaras dengan kenyataan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi diikuti dengan banyaknya bangunan serta infrastruktur di suatu wilayah akan meningkatkan kerentanan terhadap bencana tanah longsor. Akibatnya, potensi korban jiwa dan kerugian materi termasuk kerugian ekonomi semakin tinggi (Yuniarta et al., 2015).

Berdasarkan kajian data dampak bencana tanah longsor, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan bencana sangat penting dan diperlukan. Sesuai dengan kebijakan nasional, upaya penanggulangan bencana utamanya difokuskan pada langkah-langkah yang dilakukan pada saat pra-bencana salah satunya adalah kesiapsiagaan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kegiatan ini sebagai bentuk persiapan yang meliputi pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya manusia dan logistik. Dengan langkah kesiapsiagaan yang tepat, diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga jumlah korban jiwa dan kerusakan materi dapat diminimalisir (Endriono et al., 2022).

Keberadaan tenaga kesehatan yang siap siaga sangat diperlukan untuk memberikan pertolongan medis kepada masyarakat yang terdampak. Berdasarkan kondisi lapangan, meskipun Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Puskesmas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan pada saat bencana, namun keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki keahlian di bidang kesehatan. Perawat, sebagai garda terdepan dalam bidang kesehatan, memiliki peran krusial dalam memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis kepada korban bencana alam, khususnya tanah longsor (Doondori et al., 2021). Untuk menangani bencana, perawat perlu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan khusus dalam situasi darurat (Cut, dkk., 2011 dalam Azizah et al., 2015). Melihat pentingnya penanganan korban bencana tanah longsor, Dinas Kesehatan Kota Semarang mendapat dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Bapena PPNI) Kota Semarang. Sebagai bagian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), yang berkomitmen menjaga kualitas dan profesionalisme praktik keperawatan, Bapena PPNI memiliki mandat khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan komitmen PPNI dalam memberikan kontribusi aktif dalam upaya penanganan bencana, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para korban. Sebagai organisasi profesi, PPNI berperan penting dalam memastikan bahwa perawat memberikan asuhan keperawatan yang optimal pada masyarakat, termasuk

dalam situasi darurat seperti bencana, dengan mengacu pada kaidah-kaidah keilmuan perawat.

Berpedoman pada Keputusan DPP PPNI Nomor 022/DPP PPNI/SK/K.S/XII/2021, Bapena PPNI mengadopsi pendekatan manajemen bencana yang komprehensif, mencakup tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penanganan bencana yang dilakukan oleh perawat selalu mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Mengingat tingginya risiko bencana tanah longsor yang dapat menyebabkan banyaknya korban jiwa, kesiapan yang matang dalam memberikan pertolongan pertama serta penanganan medis sangatlah penting. Bapena PPNI Kota Semarang sebagai salah satu dari sebagian besar tenaga kesehatan memiliki andil dalam penanganan korban bencana tanah longsor. Dengan adanya keterlibatan Bapena PPNI, kualitas layanan kesehatan dalam praktik keperawatan dan pengembangan profesi keperawatan dapat terus meningkat, yang pada gilirannya membantu meminimalkan keparahan dan dampak korban jiwa, seperti patah tulang, luka robek, dan trauma lainnya. Menghadapi bencana tanah longsor di Kota Semarang, tenaga perawat Bapena PPNI harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan simulasi bencana secara berkala untuk meningkatkan kemampuan perawat (Setyawati et al., 2020 dalam Ihsan et al., 2022). Meskipun para perawat Bapena PPNI Kota Semarang sudah memiliki pengalaman dalam penanganan korban bencana, namun pelatihan yang diikuti belum terorganisir dengan baik. Sebagian besar pelatihan dilakukan secara mandiri melalui *webinar* atau

workshop online. Selain itu, peralatan medis yang digunakan oleh Bapena PPNI Kota Semarang saat ini masih mengandalkan peralatan medis yang berasal dari tempat kerja para perawatnya. Artinya, Bapena PPNI belum memiliki peralatan medis yang lengkap dan mandiri.

Sebagai badan yang berada di bawah naungan PPNI, Bapena PPNI didirikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rekan-rekan perawat dapat melakukan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dengan baik. Hal ini membedakan Bapena PPNI dari banyak organisasi tenaga kesehatan lainnya, yang umumnya hanya membentuk bidang atau satuan tugas sementara untuk menangani kebencanaan. Meskipun ruang lingkup dan tugas pokoknya terbatas pada sektor kesehatan, kontribusi yang diberikan Bapena PPNI dalam penanggulangan bencana tetap sangat berarti. Dengan dukungan dan keterlibatan Bapena PPNI, tenaga kesehatan dapat bekerja sama secara efektif untuk memberikan penanganan korban yang optimal. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan yang memiliki bidang keahlian berbeda dapat menciptakan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berhasil. Dengan kerjasama ini, penanganan terhadap korban bencana tanah longsor akan memberikan hasil yang maksimal. Melalui permasalahan yang ada, peneliti ingin lebih mendalami terkait kesiapsiagaan Bapena PPNI Kota Semarang dalam menangani bencana tanah longsor. Kesiapsiagaan perawat dalam bencana tanah longsor ini penting untuk dipantau dan diperhatikan lebih lanjut, karena tindakan kesiapan perawat dapat menjadi penunjang pemberian

pertolongan yang tepat dan *professional* untuk menyelamatkan nyawa korban bencana tanah dan mencegah timbulnya korban jiwa yang lebih besar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana wujud kesiapsiagaan tim Bapena PPNI dalam memberikan respon terhadap korban bencana tanah longsor di Kota Semarang ?
2. Bagaimana aksi kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh Bapena PPNI untuk membantu mengatasi korban bencana tanah longsor di Kota Semarang ?
3. Apakah kesiapsiagaan Bapena PPNI sudah sesuai dengan teori atau konsep manajemen bencana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi wujud kesiapsiagaan tim Bapena PPNI dalam memberikan respon terhadap korban bencana tanah longsor di Kota Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi aksi kesiapsiagaan yang telah dilakukan Bapena PPNI untuk membantu mengatasi korban bencana tanah longsor di Kota Semarang

3. Untuk mengidentifikasi kesesuaian kesiapsiagaan Bapena PPNI dengan teori atau konsep manajemen bencana

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya bahan referensi bagi akademisi maupun peneliti lain khususnya dalam lingkup perguruan tinggi jurusan Administrasi Publik untuk mengenal lebih luas dan memahami terkait kesiapsiagaan tim Bapena PPNI Kota Semarang dalam memberikan respon terhadap korban bencana tanah longsor.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan ilmiah penulis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk membandingkan upaya manajemen bencana yang melibatkan kesiapsiagaan tenaga perawat dalam menangani korban bencana tanah longsor.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana sehingga masyarakat mampu mempersiapkan diri dan mengurangi risiko kerugian akibat bencana tanah longsor.

c. Bagi Organisasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta tambahan informasi bagi Bapena PPNI Kota Semarang untuk memaksimalkan kesiapsiagaan perawat dalam menangani korban bencana tanah longsor.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pemaparan penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk memperoleh perbandingan serta rujukan yang relevan dalam memperkaya teori dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu membantu dalam memposisikan penelitian dalam konteks yang lebih luas serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Melalui penentuan referensi penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi batasan melalui parameter dari ruang lingkup penelitian sebelumnya. Penelitian yang dikaji ini difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi bencana tanah longsor.

Penelitian Ihsan et al (2022) membahas mengenai perspektifnya yang berpendapat bahwa perawat belum cukup siap untuk menghadapi bencana karena kesiapsiagaan perawat membutuhkan pelatihan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi perawat. Penelitian tersebut menggunakan *literatur review* dengan pendekatan PRISMA, yang memfokuskan pada analisis data sekunder untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kesiapsiagaan perawat. Berbeda dengan penelitian penulis yang akan menggabungkan analisis data sekunder dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung. Dengan demikian, penulis dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan terkini mengenai kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi

bencana dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan tersebut sesuai kondisi di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Karenhadi et al (2021) memberikan gambaran umum mengenai suatu fenomena dalam kesiapsiagaan perawat menghadapi bencana tanah longsor, khususnya dari perspektif pengetahuan, sikap dan kolaborasi dengan pihak lain. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan sampel perawat Puskesmas, penelitian tersebut berhasil mengukur tingkat kesiapsiagaan perawat dengan hasil yang tergolong baik pada pengetahuan dan sikap perawat terhadap penanggulangan bencana tanah longsor. Berbeda dengan penelitian ini yang akan menggali lebih dalam mengenai konteks sosial dan organisasi yang memengaruhi kesiapsiagaan perawat. Melalui pendekatan kualitatif, penulis berusaha memahami pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi perawat dalam sebuah organisasi menjalankan tugasnya di situasi bencana tanah longsor.

Yunus & Damansyah (2021) dalam penelitiannya berhasil menunjukkan adanya korelasi positif antara kesiapsiagaan perawat dengan keterlibatannya dalam kegiatan manajemen pra bencana. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perawat yang telah mengikuti pelatihan kesiapsiagaan cenderung siap dan aktif berperan dalam upaya mitigasi bencana. Penelitian tersebut, sebagaimana dengan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antar kedua variabel tersebut dan berfokus pada wilayah

Kabupaten Gorontalo. Berbeda dengan penelitian penulis yang akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam informasi dan akan berfokus pada Kota Semarang sebagai lokasi penelitian. Dengan demikian, penulis ingin memberikan kontribusi yang mendalam dan spesifik terhadap pemahaman mengenai kesiapsiagaan perawat dalam konteks wilayah yang berbeda.

Penelitian oleh Nastiti (2022) mengadopsi pendekatan mix antara kuantitatif dan kualitatif yang terstruktur melalui *literature review* dengan protokol JBI dan Prisma *checklist* untuk mengidentifikasi faktor-faktor kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi bencana. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih luas dan mendalam terhadap literatur yang ada. Sementara, penelitian penulis dengan pendekatan kualitatif lebih fleksibel, memungkinkan eksplorasi praktik kesiapsiagaan perawat yang dilengkapi dengan data primer (wawancara dan observasi) sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin terlewatkan dalam tinjauan literatur.

Begitu juga dengan penelitian Nurdin et al (2023) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara keterampilan perawat dengan tingkat kesiapsiagaannya, dibandingkan dengan pengetahuan maupun suasana pelayanan kesehatan Puskesmas. Penelitian Nurdin menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross-sectional* untuk menganalisis data dari perawat Puskesmas Kota Kendari pada wilayah pesisir yang rentan mengalami berbagai jenis bencana. Berbeda dengan

penelitian penulis, di mana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi bencana tanah longsor di Kota Semarang. Pendekatan penelitian yang digunakan juga berbeda, dan penelitian ini akan menganalisis kesiapsiagaan perawat dalam konteks satuan organisasi di Kota Semarang.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah disampaikan, diketahui bahwa kesiapsiagaan sangat penting bagi perawat karena dapat mendukung kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka dalam menghadapi bencana. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan, peneliti menemukan perbedaan mendasar pada topik yang diangkat. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kesiapsiagaan perawat dalam lingkungan rumah sakit dan menganalisisnya melalui pengolahan data dengan aspek-aspek tertentu untuk menentukan hubungan antara aspek tersebut atau tingkat kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi berbagai jenis bencana secara umum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis kesiapsiagaan perawat dalam penanganan bencana tanah longsor, yang sering terjadi di Kota Semarang, agar dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien. Penelitian ini mengambil subjek perawat yang tergabung dalam organisasi Bapena PPNI Kota Semarang, bukan dalam lingkup rumah sakit secara umum. Melalui organisasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan perspektif baru mengenai kesiapsiagaan perawat.

1.5.2 Administrasi Publik

Secara *etimologi*, kata "administrasi" berasal dari bahasa Latin "*ad*" yang berarti menuju, dan "*ministrate*" yang berarti melayani atau membantu (Jamil et al., 2023). Oleh karena itu, administrasi mencakup berbagai tindakan seperti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menggunakan, mengelola, mengatur, mengurus, mengusahakan, dan mendayagunakan. Menurut Siagian (2004) (dalam Supriadi & Bachtiar, 2019), administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua atau lebih individu yang didasarkan pada tujuan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara itu, kata "publik" berasal dari bahasa Inggris "*public*," yang berarti umum, masyarakat, atau negara (Sinambela, 2016) (dalam Mustamin et al., 2023).

Administrasi publik memiliki beragam definisi yang luas. Menurut Waldo (1965) (dalam Aneta, 2012), administrasi publik adalah manajemen dan organisasi manusia serta peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. Chandler dan Plano (1988) (dalam Pradipta et al, (2015) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses kolaboratif dalam mengelola sumber daya dan personel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Administrasi publik, yang melibatkan perumusan, implementasi, dan pengelolaan kebijakan publik, memiliki peran sentral dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Melalui kebijakan yang komprehensif dan efektif, administrasi publik dapat mengkoordinasikan berbagai pihak dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mengurangi dampak bencana. Kesiapsiagaan bencana merupakan bagian integral dari manajemen risiko, yang bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kerugian akibat bencana. Keterlibatan organisasi profesi seperti Bapena PPNI Kota Semarang dalam kesiapsiagaan bencana tanah longsor menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, organisasi profesi dapat berkontribusi secara aktif dalam merespon bencana, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Melalui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, di mana keberhasilan dalam menghadapi bencana juga bergantung pada sistem administrasi publik bekerja.

1.5.3 Manajemen Publik

Konsep manajemen publik merupakan hasil integrasi dari berbagai disiplin ilmu. Ilmu manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, ilmu politik, dan lainnya saling melengkapi dan berkontribusi menjadi dasar terbentuknya kajian manajemen publik. Manajemen publik merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan organisasi publik. Tujuannya

adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan sumber daya lainnya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa manajemen publik memiliki hubungan erat dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks. Mulai dari perumusan kebijakan, politik hingga pengelolaan keuangan menjadi bagian dari manajemen publik. Oleh karena itu, manajemen publik menjadi landasan bagi administrasi publik dalam menjalankan roda pemerintahan (Satibi, 2012: 13-15). Perkembangan manajemen publik telah mengalami beberapa pergeseran paradigma. Dimulai dari paradigma tradisional (*Old Public Administration*) yang kaku dan berorientasi birokrasi, kemudian bertransformasi menjadi *New Public Management* (NPM) yang lebih fleksibel dan berorientasi pasar pada tahun 1990-an. Namun, NPM dianggap kurang mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Sebagai respons, paradigma *New Public Service* (NPS) muncul pada awal abad ke-21 dengan menekankan pentingnya nilai-nilai pelayanan publik, etika, dan partisipasi masyarakat (Wijaya dan Oscar, 2014). Konsep *Collaborative Governance* yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi ciri khas dalam upaya bersama menyelesaikan masalah publik (Tilano & Suwitri, 2019).

Manajemen publik merupakan cabang dari ilmu administrasi publik. Esensi dari manajemen publik sendiri diarahkan untuk mengelola berbagai sektor publik secara profesional dan proporsional dengan memanfaatkan

segala potensi yang ada sehingga diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang prima, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen publik tidak hanya sebatas menjalankan prosedur dan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pengelolaan memberikan dampak dan manfaat yang nyata bagi masyarakat (Satibi, 2012: 22). Hal ini sesuai dengan penelitian penulis, yang mana manajemen publik memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan bencana tanah longsor bagi Bapena PPNI Kota Semarang. Melalui manajemen publik, Bapena PPNI dapat merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan sumber daya serta strategi dalam menghadapi situasi darurat, dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional bidang penanggulangan bencana. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana, manajemen publik membantu perawat untuk memahami perannya, yang mampu mendukung peningkatan kemampuan penanganan situasi darurat, serta memastikan ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan saat terjadi bencana. Manajemen publik yang efektif juga memperkuat kolaborasi antar lembaga sehingga perawat dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah serta masyarakat untuk siap siaga memberikan pelayanan kesehatan dengan respon cepat dan tepat kepada masyarakat yang terdampak bencana.

1.5.4 Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena kebencanaan dan segala aspek yang terkait dengan

keberadaan bencana, khususnya dalam mengelola risiko bencana dan upaya pencegahan bencana tersebut (Permana, 2018). Adapun manajemen bencana menurut Susanto (2006) (dalam Nisa, (2014) adalah proses yang berkelanjutan di mana pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi dampak bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi dan melakukan upaya pemulihan.

Melalui pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen bencana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola dan merespon situasi bencana dengan tujuan mengurangi risiko dari bencana itu sendiri. Tindakan ini mencakup berbagai tindakan proaktif dan responsif untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi pada manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 manajemen bencana dalam penerapannya melibatkan 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- 1) Tahap Pra-Bencana

Tahap pra-bencana merupakan tahapan manajemen bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Dalam tahap ini mencakup tindakan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

- 2) Tahap Saat Terjadinya Bencana

Pada saat terjadinya bencana terdapat banyak pihak yang menaruh perhatian dan secara spontan memberikan bantuan moral dan material, baik dari pemerintah atau komunitas lokal maupun dari

luar wilayah. Kegiatan saat terjadinya bencana mencakup kegiatan tanggap darurat untuk mengurangi penderitaan sementara dan mengatasi dampak yang ditimbulkan.

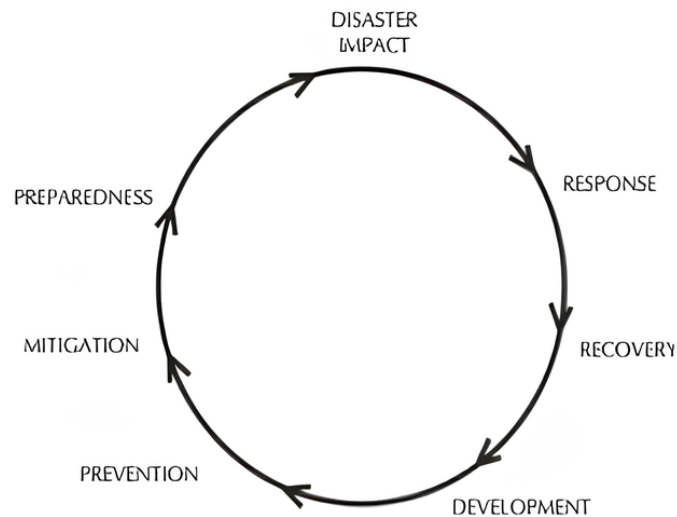
3) Tahap pasca bencana

Tahap pasca bencana atau setelah bencana pada dasarnya mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam tahap ini, dilakukan perbaikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh.

Dengan demikian, melalui penjelasan yang telah disampaikan manajemen bencana meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghadapi segala kemungkinan terjadinya bencana. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga sebelum dan sesudah bencana. Pemahaman tentang kegiatan manajemen bencana dikenal sebagai siklus manajemen bencana yang digambarkan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, di mana setiap tahapan saling terikat satu sama lain. Nick Carter dalam bukunya, "*Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*", membagi manajemen bencana menjadi enam tahapan utama (Carter, 1991).

Gambar 1.2

Siklus Manajemen Bencana Menurut Nick Carter



Sumber : Carter, 1991

Nick Carter mengusulkan sebuah model manajemen bencana yang terbagi menjadi tiga tahap besar. Tahap pertama adalah pra-bencana, yang mencakup upaya *prevention* (pencegahan), *mitigation* (peringanan), dan *preparadness* (kesiapsiagaan) menghadapi bencana. Tahap kedua adalah tanggap darurat yang dilakukan ketika bencana sedang terjadi, meliputi *disaster impact* (dampak bencana), dan *response* (tanggapan). Tahap terakhir adalah pasca bencana, di mana fokus utamanya pada *recovery* (pemulihan) kondisi, dan *development* (pembangunan) daerah yang terdampak.

Sejalan dengan konsep siklus bencana yang diusulkan oleh Nick Carter, mencakup enam tahapan yang saling terkait mulai dari pencegahan

hingga pemulihan. Studi ini membatasi lingkup pembahasan pada tahap pra-bencana, khususnya kesiapsiagaan organisasi perawat dalam konteks bencana longsor di Kota Semarang. Dengan mempertimbangkan tingginya kerentanan wilayah terhadap bencana tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kesiapsiagaan organisasi perawat (Bapena PPNI Kota Semarang) dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak bencana, seperti angka kematian dan tingkat keparahan cedera.

1.5.5 Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan bencana merupakan bagian penting dari proses manajemen bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan bencana adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutton dan Tierney (2006) (dalam Ramadoan dan Sahrul, 2019), yang menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana mencakup upaya perlindungan aktif yang dilakukan sebelum dan selama bencana terjadi, meliputi penerapan solusi jangka pendek serta jangka panjang. IDEP (2007) (dalam Rahmat et al, 2023: 51) juga menyoroti tujuan kesiapsiagaan ini adalah untuk mengurangi ancaman, menurunkan tingkat kerentanan masyarakat, meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta membangun kerjasama yang efektif. Kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tenaga kesehatan perawat, sebagai salah satu komponen penting dalam

sistem kesehatan, memiliki peran krusial dalam memberikan pertolongan pertama pada korban bencana (Husna, 2012 dalam Yunus & Damansyah, 2021).

Berdasarkan kajian LIPI-UNESCO/ISDR tahun 2006 *framework* kesiapsiagaan bencana dikelompokkan ke dalam empat parameter, yaitu:

1. Pengetahuan dan Sikap

Pengetahuan yang lebih luas sangat penting untuk memahami dasar-dasar mengenai bencana alam, termasuk ciri-ciri, gejala, dan penyebabnya. Pemahaman ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi semata, tetapi juga menjadi landasan bagi tindakan yang tepat dan kesadaran individu dalam menghadapi situasi darurat. Dengan kapasitas pengetahuan yang memadai, diharapkan setiap individu dapat mengambil langkah preventif dan responsif yang lebih baik, menjadikannya pijakan kuat dalam membangun kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana.

2. Rencana Tanggap Darurat

Pada parameter ini akan diketahui sejauh mana rencana kesiapsiagaan telah disusun dan diterapkan dalam menghadapi bencana. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kemampuan individu dalam melakukan tindakan penyelamatan diri, kesiapan alat komunikasi untuk mendukung koordinasi, ketersediaan peta evakuasi yang jelas dan mudah diakses, hingga

berbagai upaya lain yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan kerugian.

3. Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini yang dimaksud di sini merujuk pada upaya untuk meminimalkan risiko korban jiwa akibat bencana melalui penyampaian tanda-tanda peringatan secara cepat dan efektif. Sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang potensi bahaya yang akan datang sehingga mereka dapat segera mengambil langkah-langkah antisipasi, seperti evakuasi, penyelamatan diri, atau tindakan pencegahan lainnya.

4. Kemampuan Mobilisasi Sumber Daya

Salah satu aspek penting dalam menghadapi bencana adalah kesiapsiagaan, yang menjadi kunci untuk meminimalkan dampak dari situasi darurat. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan penguatan sumber daya yang dimiliki, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun dukungan material. Setiap anggota harus dibekali dengan keterampilan khusus yang relevan. Selain itu, penyediaan dana dan sumber daya lain juga menjadi faktor pendukung yang tak kalah penting untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan secara optimal.

1.5.6 Aksi Kesiapsiagaan Bencana

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui aksi kesiapsiagaan bencana menurut Frederika et al (2023) , yaitu :

1) Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) berkaitan dengan sejauh mana organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang cukup serta terlatih untuk menghadapi situasi darurat. Ketersediaan personil ini memastikan bahwa organisasi dapat segera merespons bencana dengan memobilisasi tenaga medis, relawan, atau profesional lainnya sesuai kebutuhan.

2) Kelembagaan

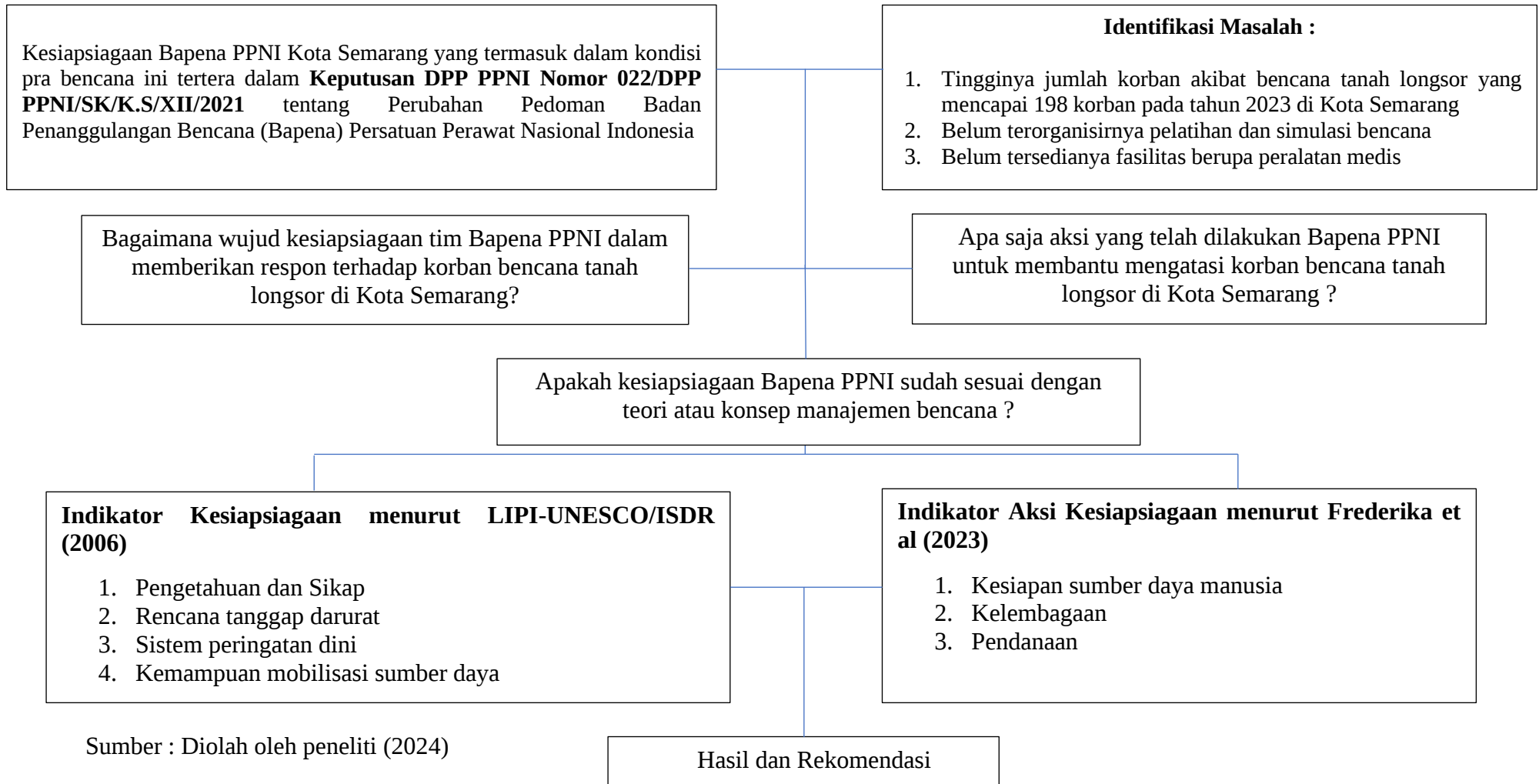
Kelembagaan mencakup pada keberadaan struktur organisasi yang menetapkan pembagian tugas serta kewenangan setiap anggota secara jelas sehingga dapat diketahui sejauh mana sumber daya manusia siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, kelembagaan juga merujuk pada kerja sama yang melibatkan berbagai pihak sebagai pelaksana, dengan dilengkapi mekanisme koordinasi untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama dapat terorganisir.

3) Pendanaan

Pendanaan merujuk pada alokasi dana yang dilakukan secara efisien untuk mendukung upaya tanggap darurat, dengan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap program

dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat memberikan hasil yang optimal dan tepat sasaran.

1.5.7 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah proses yang dilakukan untuk menurunkan konsep-konsep penelitian ke dalam bentuk yang lebih spesifik dengan menggunakan indikator-indikator yang jelas sehingga konsep tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan diamati. Tujuan dari operasionalisasi ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, dengan memastikan bahwa setiap dimensi yang diurai mampu memberikan gambaran yang akurat dan tepat mengenai fenomena yang diteliti. Keberhasilan kerangka operasional ini dapat diamati melalui seberapa baik indikator-indikator yang digunakan dalam operasionalisasi tersebut mencerminkan dan menjelaskan konsep secara menyeluruh. Operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pelaksanaan tahapan pra bencana dalam wujud kesiapsiagaan yang sesuaikan dengan alat penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.

1.6.1 Kesiapsiagaan Bapena PPNI Kota Semarang

Dalam operasionalisasi konsep yang berkaitan dengan kesiapsiagaan Bapena PPNI dalam menangani korban bencana tanah longsor di Kota Semarang, masalah terkait banyaknya korban akibat bencana tanah longsor perlu diidentifikasi melalui tingkat kesiapsiagaan yang ada. Kesiapsiagaan organisasi dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2006), yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan Sikap

Pengetahuan yang lebih luas sangat penting untuk memahami dasar-dasar mengenai bencana alam, termasuk ciri-ciri, gejala, dan penyebabnya. Pemahaman ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi semata, tetapi juga menjadi landasan bagi tindakan yang tepat dan kesadaran individu dalam menghadapi situasi darurat. Dengan kapasitas pengetahuan yang memadai, diharapkan setiap individu dapat mengambil langkah preventif dan responsif yang lebih baik, menjadikannya pijakan kuat dalam membangun kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana. Adapun sub-indikator dari pengetahuan yang diteliti, yaitu:

- 1) Pemahaman risiko dan penyebab tanah longsor

2. Rencana Tanggap Darurat

Pada parameter ini akan diketahui sejauh mana rencana kesiapsiagaan telah disusun dan diterapkan dalam menghadapi bencana. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kemampuan individu dalam melakukan tindakan penyelamatan diri, kesiapan alat komunikasi untuk mendukung koordinasi, ketersediaan peta evakuasi yang jelas dan mudah diakses, hingga berbagai upaya lain yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan kerugian. Adapun sub-indikator dari rencana tanggap darurat yang diteliti, yaitu:

- 1) Adanya rencana kontinjensi

2) Kesiapan pengambilan tindakan

3) Komunikasi dan koordinasi

3. Sistem Peringatan dini

Sistem peringatan dini yang dimaksud di sini merujuk pada upaya untuk meminimalkan risiko korban jiwa akibat bencana melalui penyampaian tanda-tanda peringatan secara cepat dan efektif. Sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang potensi bahaya yang akan datang sehingga mereka dapat segera mengambil langkah-langkah antisipasi, seperti evakuasi, penyelamatan diri, atau tindakan pencegahan lainnya. Adapun sub-indikator dari sistem peringatan dini yang diteliti, yaitu:

1) Penyebarluasan informasi

4. Kemampuan Mobilisasi Sumber Daya

Salah satu aspek penting dalam menghadapi bencana adalah kesiapsiagaan, yang menjadi kunci untuk meminimalkan dampak dari situasi darurat. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan penguatan sumber daya yang dimiliki, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun dukungan material. Setiap anggota harus dibekali dengan keterampilan khusus yang relevan. Selain itu, penyediaan dana dan sumber daya lain juga menjadi faktor pendukung yang tak kalah penting untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan secara optimal. Adapun sub-indikator dari kemampuan mobilisasi sumber daya yang diteliti, yaitu:

- 1) Pelatihan dan simulasi bencana
- 2) Pengelolaan sumber daya organisasi

1.6.2 Aksi Kesiapsiagaan Bencana Bapena PPNI Kota Semarang

Pada operasionalisasi konsep terkait kesiapsiagaan Bapena PPNI dalam menangani korban bencana tanah longsor di Kota Semarang, Aksi kesiapsiagaan yang telah dilakukan organisasi dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan oleh Frederika et al (2023) , yaitu :

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) berkaitan dengan sejauh mana organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang cukup serta terlatih untuk menghadapi situasi darurat. Ketersediaan personil ini memastikan bahwa organisasi dapat segera merespons bencana dengan memobilisasi tenaga medis, relawan, atau profesional lainnya sesuai kebutuhan. Adapun sub-indikator dari kesiapan sumber daya manusia yang diteliti, yaitu:

1) Ketersediaan personil

2. Kelembagaan

Kelembagaan mencakup pada keberadaan struktur organisasi yang menetapkan pembagian tugas serta kewenangan setiap anggota secara jelas sehingga dapat diketahui sejauh mana sumber daya manusia siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, kelembagaan juga merujuk pada kerja sama yang melibatkan berbagai pihak sebagai pelaksana, dengan dilengkapi

mekanisme koordinasi untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama dapat terorganisir. Adapun sub-indikator dari kesiapan sumber daya manusia yang diteliti, yaitu:

- 1) Struktur organisasi
- 2) Kerja sama dengan instansi lain

3. Pendanaan

Pendanaan merujuk pada alokasi dana yang dilakukan secara efisien untuk mendukung upaya tanggap darurat, dengan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat memberikan hasil yang optimal dan tepat sasaran. Adapun sub-indikator dari kesiapan sumber daya manusia yang diteliti, yaitu:

- 1) Alokasi dana

1.7 Argumen Penelitian

Tingginya tingkat kerawanan tanah longsor di Kota Semarang menjadikan bencana ini sebagai masalah kompleks yang berulang. Fluktuasi angka kejadiannya menyulitkan upaya mitigasi dan membuat risiko kerugian baik materi maupun korban jiwa. Siklus bencana ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, namun juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peran berbagai lembaga untuk meningkatkan respon penanganan bencana secara efektif. Keterlibatan komunitas perawat dalam manajemen bencana menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga non-pemerintah berbasis profesi. Ilmu keperawatan, yang dikenal sebagai ilmu medis, dapat meluas perannya dalam komunitas untuk menangani bencana khususnya pada tahap pra-bencana. Dalam setiap pelaksanaan Bapena PPNI memiliki tanggung jawab tersendiri kepada masyarakat melalui pemerintah dan badan-badan pemerintah dalam mendukung penanganan kebencanaan dan kegawatdaruratan baik yang bersifat kecelakaan maupun bencana, yang mana dalam menangani korban bencana tanah longsor tim Bapena PPNI Kota Semarang perlu kesiapan yang matang karena nantinya perawat akan bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan serta membantu menciptakan masyarakat yang siap, tangguh dan mampu pulih dari dampak bencana.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Semiawan (2010), metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena, fakta, atau kenyataan. Fakta, kenyataan, masalah, gejala, dan peristiwa hanya dapat dipahami dengan baik jika peneliti melakukan penyelidikan yang mendalam, tidak sekadar melihat dari perspektif permukaan. Pemahaman mendalam ini bisa dicapai melalui observasi, wawancara, dan pengalaman langsung yang dilakukan oleh peneliti.

Hal ini menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dikembangkan oleh peneliti melalui interpretasi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan informasi asli dari subjek penelitian. Beragam sumber data, seperti catatan observasi, wawancara, pengalaman individu, dan sebagainya dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses interpretasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan tim Bapena PPNI Kota Semarang dalam menghadapi dan merespon kejadian bencana tanah longsor, khususnya dalam penanganan dampak terhadap korban jiwa.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian disebut juga lokasi penelitian, di mana peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan dengan topik permasalahan

penelitian. Pemilihan situs penelitian dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mempermudah proses pengumpulan data dan mendukung keakuratan hasil. Dalam Penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat pengambilan data dan informasi penelitian mengenai kesiapsiagaan perawat, yaitu Badan Penanggulangan Bencana (Bapena) PPNI Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada informan yang tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai representasi populasi yang memungkinkan peneliti mendapatkan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran subjek dalam penelitian menjadi kunci penting dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini melibatkan pengurus atau anggota Bapena PPNI Kota Semarang sebagai pelaksana tindakan yang berfokus pada kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi korban bencana. Para perawat bertindak sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi masing-masing berdasarkan bidang keilmuannya dalam menghadapi dampak bencana tanah longsor.

1.8.4 Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang berasal dari data diskriptif berupa informasi tertulis maupun lisan dari responden (wawancara, observasi dan dokumentasi). Penelitian lapangan ini berlandaskan pada fakta dengan menggambarkan kondisi

lapangan secara langsung terkait fenomena yang dapat menentukan arah penelitian sesuai dengan konteks tujuan yang ingin dicapai, dan pada akhirnya mengacu pada penelitian yang menyediakan solusi untuk permasalahan yang ada (Sulistyawati, 2023: 26). Melalui penelitian lapangan, peneliti menganalisis sejauh mana kesiapan tim Bapena PPNI Kota Semarang dapat membantu dalam melakukan respon darurat terhadap kejadian bencana tanah longsor, termasuk penanganan korban secara efektif.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari perolehan data penelitian. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui pengurus Bapena PPNI Kota Semarang. Perolehan sumber data terbagi menjadi dua macam, di antaranya:

a Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari informan atau sumber utama sesuai dengan topik penelitian (Balaka, 2022). Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dan pengumpulan data langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai bentuk kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan oleh Bapena PPNI Kota Semarang dalam merespon dampak bencana tanah longsor.

b Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya (Balaka, 2022). Penelitian ini memperoleh data sekunder dari berbagai publikasi ilmiah, termasuk artikel jurnal, buku, dan situs *website* yang berhubungan dengan topik kesiapsiagaan bencana dalam konteks praktik keperawatan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara dan Dokumentasi.

a Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan (Sahir, 2021). Dengan ini, Wawancara menjadi metode penelitian yang krusial untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Pemilihan jenis pertanyaan wawancara yang tepat menjadi kunci keberhasilan penelitian karena tindakan ini akan menentukan kualitas dan relevansi data yang diperoleh. Pertanyaan yang baik harus didasarkan pada rumusan masalah penelitian dan disesuaikan dengan karakteristik informan agar dapat menggali informasi yang mendalam dan relevan (Sulistyawati, 2023: 162-163).

b Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui berbagai dokumen yang terdokumentasi, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun dokumen rekaman. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, kumpulan surat pribadi, kliping, dan lain-lain. Sementara itu, dokumen rekaman dapat berupa film, rekaman audio, *microfilm*, foto, dan sebagainya (Rahmadi, 2011: 85). Penelitian ini akan mendokumentasikan kesiapsiagaan Bapena PPNI Kota Semarang dalam menghadapi bencana longsor, termasuk foto-foto kegiatan dan laporan mengenai kondisi bencana tanah longsor di Kota Semarang.

1.8.7 Analisis Dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai proses pengaturan data secara sistematis, mengorganisasikannya menjadi pola, kategori, dan unit dasar, di mana proses ini diikuti dengan penafsiran atau interpretasi data. Secara singkat, teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Tahapan ini mencakup pemisahan data dan penyatuan kembali dalam bentuk tabel, diagram, narasi, gambar, atau ringkasan. Selanjutnya, teknik ini memberikan penjelasan terkait kesimpulan yang diambil dari data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam menganalisis data, peneliti menyusun data atau informasi yang telah dikumpulkan secara sistematis, yang berasal dari catatan observasi, wawancara, dokumen, dan sumber lainnya, dengan melakukan

proses kategorisasi atau klasifikasi, perbandingan, serta pencarian hubungan antar data. Penataan semacam ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang objek penelitian dan menyajikan temuan baru bagi orang lain (Rahmadi, 2011:92-93).

1.8.8 Kualitas Data (*Goodnes Criteria*)

Kualitas data berkaitan dengan kelengkapan dan keakuratan data (Batini et al., 2009). Rancangan untuk menjaga kualitas data agar tetap tinggi dengan memberikan gambar yang jelas terkait fenomena penelitian yang mampu berdampak pada analisis data untuk memberikan saran dalam masalah penelitian. Kualitas data berhubungan dengan validitas data, di mana data dikatakan valid jika pelaporan data dengan hasil data yang diperoleh sama-sama relevan untuk dijadikan dasar kajian dalam penelitian. Validitas data sebagai alat penguji kebenaran data dari pengumpulan informasi dalam penganalisan masalah, yang nantinya dipertanggungjawabkan sebagai hasil penelitian. Peningkatan validitas penelitian dapat dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi merupakan penggabungan data dan sumber yang ada untuk memeriksa keabsahan data. Terdapat tiga jenis teknik tringulasi yang meliputi tringulasi sumber, tringulasi teknik dan tringulasi waktu (Sugiyono, 2014):

1. Tringulasi sumber, yaitu menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber informan.

2. Tringulasi teknik, yaitu menguji keabsahan data dengan menggunakan berbagai teknik pada sumber yang sama.
3. Tringulasi waktu, yaitu menguji keabsahan data dengan menerapkan teknik tertentu pada waktu atau situasi yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam hal ini peneliti menguji keabsahan data, dengan cara mengumpulkan informasi yang valid melalui jurnal, wawancara, observasi, dan sumber relevan lainnya. Peneliti akan membandingkan kondisi dan perspektif dari setiap pihak terkait, dan hasil dari pengecekan ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan.